



Penerapan Pancasila Sebagai Sistem Etika Bangsa Indonesia

Application of Pancasila as the Ethical System of the Indonesian Nation

Susilawati N¹, Bambang Niko Pasla²

¹Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi, Indonesia

²Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Abstract

Ethics is related to good living habits, and reasonable living procedures, for individuals or society. In this sense, ethics is the same as morals. In a broad sense, ethics is the science that discusses the criteria of good and bad. Ethics are generally understood as philosophical thoughts about everything considered good or bad in human behavior. Ethics is always related to the issue of values, so the discussion about ethics typically talks about matters of good or bad values. Pancasila as an ethical system is very urgent to be applied in the life of a nation and state because of the problems faced by the Indonesian people, among others: 1) The many cases of corruption that hit the State of Indonesia to weaken the joints of life as a nation and state, 2) The occurrence of acts of terrorism in the name of religion so that it can damage the spirit of tolerance in inter-religious life, and melt the spirit of unity or threaten the disintegration of the Nation, 3) Human rights violations still occur in the life of the state, 4). The gap between rich and poor groups still marks the lives of Indonesian people, 5) legal injustice that still colors the judicial process in Indonesia, and 6) Many wealthy people are not willing to pay taxes correctly. The strategy for implementing Pancasila as an ethical system in the life of the Nation and state for the Indonesian people is carried out as follows: 1) Character education, 2) Reference Criteria for State Administrators, 3) Raising Awareness of Taxpayers, 4) Manifestation of the Pancasila Value in the Human Rights Law, and 5) Manifestation of the Pancasila Value in the Environmental Law.

Keywords: *Pancasila as an ethical system; Application of Pancasila from time to time; The urgency of Pancasila as the state ideology, The concept of Applying Pancasila as an ethical system*

Abstrak

Etika berkaitan dengan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, pada individu atau masyarakat. Dalam pengertian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam pengertian luas adalah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai baik atau buruk. Pancasila sebagai sistem etika sangat urgen diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena problem yang dihadapi bangsa Indonesia antara lain: 1) Banyaknya kasus korupsi yang melanda Negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, 2) Masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, dan meluluhkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa, 3) Masih terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara, 4).

Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia, 5) Ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia dan 6) Banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Strategi penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Bangsa Indonesia dilakukan sebagai berikut : 1) Pendidikan karakter. 2) Kriteria Acuan Penyelenggara Negara, 3) Membangkitkan Kesadaran Wajib Pajak, 4) Pengejawantahan Nilai Pancasila Dalam UU Hak Azasi Manusia, dan 5) Pengejawantahan Nilai Pancasila Dalam UU Lingkungan Hidup.

Kata kunci: Pancasila sebagai sistem etika; Penerapan pancasila dari masa ke masa; Urgensi pancasila sebagai ideologi negara; Konsep Penerapan Pancasila sebagai sistem etika

PENDAHULUAN

Etika adalah hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dengan memiliki etika maka kita mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan lancar.

Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila. Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia. Karena Pancasila adalah dasar Negara Indonesia, maka setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh warga Indonesia harus berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila. Setiap butir dari Pancasila mengandung pedoman-pedoman yang dapat dijadikan landasan oleh warga Indonesia untuk bertindak. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia juga harus didasari oleh nilai moral. Pancasila sebagai sistem etika merupakan jalan hidup bangsa Indonesia dan juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertindak.

Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika

Istilah etika berasal dari Bahasa Yunani, Ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang

rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas adalah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika.

Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai (baik atau buruk). Frondizi menerangkan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri, nilai membutuhkan pengembalian untuk keberadaannya,

misalnya, nilai kejujuran melekat pada sikap dan kepribadian seseorang. Istilah nilai mengandung penggunaan yang kompleks dan bervariasi. Lacey menjelaskan bahwa paling tidak ada enam pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu :

1. Sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya.
2. Suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang.
3. Suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri.
4. Suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik diantara berbagai kemungkinan tindakan.
5. Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain.
6. Suatu “objek nilai”, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri.

Dengan demikian, nilai sebagaimana pengertian butir kelima, yaitu sebagai standar fundamental yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam bertindak, merupakan kriteria yang penting untuk

mengukur karakter seseorang. Nilai sebagai standar fundamental ini pula yang diterapkan seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain sehingga perbuatannya dapat dikategorikan etis atau tidak. Namun dalam Bahasa pergaulan orang sering kali mencampuradukkan istilah etika dan etiket, padahal keduanya mengandung perbedaan makna yang hakiki. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun, adat istiadat. Jika dilihat dari asal usul katanya, etika berasal dari kata “*ethos*”, sedangkan etiket berasal dari kata “*etiquette*”. Keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normatif, tetapi etika lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk, sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat, yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Contoh, mencuri merupakan pelanggaran moral, tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Etiket, misalnya terkait dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan atau beretiket.

Aliran – Aliran Etika

Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi :

Etika Keutamaan (Etika Kebajikan)

Adalah teori yang mempelajari keutamaan (virtue), artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan

manusia, lebih menekankan pada “Saya harus menjadi orang yang bagaimana?”. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, ksatriya, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, suka bekerja bersama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, bersahaja, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleransi.

Etika Teleologis

Teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas – asas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Etika teleologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika teleologis ini juga menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Aliran etika teleologis, meliputi eudaemonisme, hedonisme, utilitarianisme.

Urgensi Etika Bagi Kehidupan Bangsa

Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut :

1. Banyaknya kasus korupsi yang melanda Negara Indonesia sehingga dapat

melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, dan meluhlantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa.
3. Masih terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara.
4. Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia.
5. Ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia.
6. Banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar.

Kesemuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai Leading Principle bagi warga Negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Namun, diperlukan kajian kritis-rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos.

Etika Pancasila

Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai – nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan (mitsein), cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Meskipun corak karena etika Pancasila tercermin dalam empat tabiat saleh, yaitu :

1. Kebijaksanaan, artinya melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal – rasa – kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak (Tuhan) dalam memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religious.
2. Kesederhanaan, artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan.
3. Keteguhan, artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan.
4. Keadilan artinya memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain, serta terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Konsep Penerapan Pancasila Sebagai Sistem Etika

Faktor internal yang menyebabkan minimnya penerapan nilai Pancasila bisa disebabkan berbagai hal. Salah satu contoh, sistem pendidikan Indonesia yang kurang memperhatikan pembelajaran moral dan etika. Kita bisa melihat bahwasanya standar pendidikan dan kelulusan sekolah-sekolah ditentukan oleh pelajaran-pelajaran seperti Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, dan Bahasa Inggris. Tidak satupun dari seluruh pelajaran tersebut yang menitik beratkan pembelajaran kepada aspek moral dan etika. Sehingga dari pembelajaran tersebut, hanya akan melahirkan siswa-siswa yang materialistis. Sedangkan dari faktor eksternal adalah banyaknya pengaruh budaya dan peradaban luar negeri yang menyebabkan anjlok dan luruhnya jati diri bangsa yang telah dirangkum dalam Pancasila. Kita sangat menyayangkan penyalahgunaan kebebasan seperti yang telah didengungkan oleh negara lain

tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Sebenarnya, HAM tersebut sudah termasuk kedalam Pancasila, yaitunya dalam sila keadilan sosial. Saat ini, kebebasan HAM telah disalahgunakan menjadi sebuah alibi dan pembenaran atas kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang. Misalnya saja, alasan kebebasan HAM dan hak ber-ekspresi yang seakan-akan ingin “memperbolehkan” masyarakat untuk berpakaian “buka-bukaan”. Mereka membuat seolah-olah apa yang mereka lakukan adalah merupakan kebebasan yang hakiki. Tentusaja hal ini sangat bertentangan dengan prinsip yang tertuang dalam sila ke-dua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan BERADAB”. Dan hal tersebut bukanlah budaya dan kebiasaan bangsa Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila harus tetap dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia agar tetap menjadi Bangsa Indonesia yang benar-benar Indonesia. Karena pada dasarnya Pancasila adalah pondasi dasar negara yang terus dipegang erat oleh bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan etika.

Strategi Penerapan Pancasila

Strategi penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Bangsa Indonesia dilakukan sebagai berikut :

Pendidikan karakter

Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada

pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-contoh dekadensi moral, antara lain : penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Kesemuanya itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah.

Kriteria Acuan Penyelenggara Negara

Korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak boleh, pantas dan tidak pantas, baik dan buruk (*good and bad*). Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk.

Membangkitkan Kesadaran Wajib Pajak

Kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan membayar pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk

secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan.

Pengejawantahan Nilai Pancasila Dalam UU Hak Azasi Manusia

Pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di media, seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, disamping diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM.

Pengejawantahan Nilai Pancasila Dalam UU Lingkungan Hidup:

Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lain. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat.

Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan tindakan emosional, mau menang sendiri, keuntungan sesaat, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan kedalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas perusak lingkungan. Selain itu, perlu juga diberikan penghargaan untuk setiap penggiat lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN dan SARAN

Pancasila sangat diperlukan sebagai sistem etika untuk memberikan pedoman dan arahan agar setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia berpedoman pada sikap moral yang berlandaskan Pancasila. Setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai cerminan dari pelaksanaan Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika dapat diamalkan dengan melaksanakan setiap pengamalan di setiap butir Pancasila.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu akan menemui banyak tantangan, begitu pula tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Tantangan dihadapi untuk dimenangkan, begitu pula dengan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Jika Bangsa Indonesia sudah menerapkan etika di setiap butir Pancasila, maka tantangan penerapan Pancasila sebagai sistem etika dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. (2016). PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI PANCASILA BAGI MASYARAKAT SEBAGAI MODAL DASAR PERTAHANAN NASIONAL NKRI. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1), 37-50. <https://doi.org/10.21067/jmk.v1i1.1185>
- Anggraini, dkk. 2020. *Pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial*. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik. Volume 2 Nomor 1. Tahun 2020.
- Anggraini, C & Imaniyati, N. 2018. Fasilitas Belajar dan Manajemen Kelas Sebagai Determinan Terhadap Prestasi Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan Manajemen*
- BASIT, ABDUL, and LUDFI ARYA WARDANA. 2016. "PENGEMBANGAN PERANGKAT ASESMEN AUTENTIK DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1(2):73-78. doi: 10.17977/UM019V1I22016P073.
- Belladonna, Aprillio Poppy, Selly Novia Anggraena, Sekolah Tinggi, Keguruan Ilmu, and Pendidikan Pasundan. 2019. *PENGUATAN PENGETAHUAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC KNOWLEDGE) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MAHASISWA*. Vol. 3.
- Hadiwijono, August. 2016. *Pendidikan Pancasila, eksistensinya bagi mahasiswa*. Jurnal Cakrawala Hukum. Volume 7 Nomor 1. Juni 2016.
- <http://menarailmuku.blog.sport.com/2012/12/tujuan-pondidikan-pancasila.html>
- <http://www.kompasiana.com/2017/26/hambatan-penanaman-nilaipancasila>
- <http://www.edukasi.kompasiana.com/2012/04/14/tujuan-pendidikan-nasionalunesco>
- Kalidjernih, F., & Winarno, W. (2019). Dari terminologi ke substansi pendidikan kewarganegaraan: Implikasi terhadap revitalisasi Pancasila. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(1), 38-50. doi:<https://doi.org/10.21831/jc.v16i1.25311>
- Mahdi, I., & Sirajuddin, S. (2019). Philosophy of Law in Forming Religious-Based Regional Regulations. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 23(1), 61 - 70. doi:<http://dx.doi.org/10.29300/madania.v23i1.1964>
- Marhaeni, Sri Sedar. 2016. *Pangamalan nilai Pancasila melalui pemahaman Islam yang baik dan benar*. JPPKn Volume 1 Nomor 1. Desember 2016.
- PASLA, B. N. (2009). *Pengaruh inteligensi emosional terhadap organizational citizenship behavior dengan kohesivitas sebagai pemediasi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Priyambodo. 2007. *Manajemen Farmasi Industri*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Ramdani, Emi, Marzuki Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Jl Colombo No, and Karang Malang Yogyakarta. n.d. *PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TERHADAP SIKAP RELIGIUS SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN*.
- Rianto, Hadi dan Syarif Firmansyah. 2017. *Upaya mewujudkan pemahaman nilai-nilai patriotisme dalam bersikap mahasiswa Program Studi PPKN IKIP PGRI Pontianak*. SOSIAL HORIZON:

Jurnal Pendidikan Sosial. Volume 4
Nomor 1. Juni 2017.

Setiabudhi, I Ketut Rai; I Gede Artha dan I
Putu Rasmadi Arsha Putra. 2018.
*Urgensi kewasadaan dini dalam rangka
memperkuat ersatuan dan kesatuan
bangsa.* Jurnal Magister Hukum
Udayana. Volume 7 Noor 2. Juli 2018

Suhaida, D., & Syarifah, F. (2019). Analisis
model pembelajaran berbasis
pendidikan karakter untuk membentuk
karakter siswa. *Jurnal Civics: Media
Kajian Kewarganegaraan*, 16(2), 111-
121.

doi:<https://doi.org/10.21831/jc.v16i2.21757>

Syarbaini , Syahrial 2003. *Pendidikan
Pancasila di Perguruan Tinggi.* Jakarta:
Ghalia

Trisiana, A., Sugiaryo, S., & Rispantyo, R.
(2019). Model desain Pendidikan
Kewarganegaraan di era media digital
sebagai pendukung implementasi
pendidikan karakter. *Jurnal Civics:
Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(2),
154-164.

doi:<https://doi.org/10.21831/jc.v16i2.24743>

Hidayah, Y., & Ulfah, R. (2020).
Mengembangkan Keterampilan
Berpikir Kritis melalui Pendidikan
Kewarganegaraan di Perguruan
Tinggi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2),
275-281.

doi:<http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i2p275-281>

Winataputra, U. S. (2016). POSISI
AKADEMIK PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN (PKn) DAN
MUATAN/MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (PPKn)

DALAM KONTEKS SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL. *Jurnal
Moral Kemasyarakatan*, 1(1), 15-36.
<https://doi.org/10.21067/jmk.v1i1.1184>

Wijayanto J., R., & Marzuki, M. (2018).
PENDIDIKAN BELA NEGARA
SEBAGAI TONGGAK PERADABAN
JIWA PATRIOTISME GENERASI
MUDA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2),
186-191.

doi:<http://dx.doi.org/10.17977/um019v3i2p186-191>